

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan elemen utama dalam kehidupan manusia. Proses komunikasi memegang kendali yang sangat besar dalam membentuk pola pikir seseorang. Hal ini dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang menyajikan pesan secara terstruktur terkait suatu informasi, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan makna, bahkan saling mempengaruhi antara keduanya (Rahman, 2016). Menurut (Suranto, 2011) dalam (Attaymini, 2014), interaksi yang tercipta itu mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, mereka memiliki naluri untuk berbicara, berbagi pengalaman hidup, bertukar pikiran dan pendapat, serta bekerja sama demi kelangsungan hidupnya di dunia. Namun, seringkali komunikasi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik dan persaingan.

Pada dasarnya, konflik dan persaingan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut George Simmel dalam Spykman (2017), persaingan adalah suatu kondisi berkelanjutan yang melibatkan seseorang atau suatu kelompok dalam memperebutkan tujuan yang sama. Hal ini meliputi berbagai tindakan untuk menghambat serta menghalangi pihak lainnya, agar mereka tidak mampu mencapai tujuan tersebut. Sedangkan konflik adalah permasalahan yang prosesnya terputus-putus, biasanya dihadapi manusia oleh batinnya sendiri. Selain itu, konflik juga diartikan sebagai pertentangan karena adanya perbedaan pendapat dari kedua belah pihak, sebab tujuan mereka saling berlawanan.

Konsep konflik yang dikemukakan oleh George Simmel menggambarkan bahwa setiap individu memiliki naluri untuk saling bermusuhan karena secara alamiah, mereka dipengaruhi oleh *feeling of hostility* atau perasaan buruk yang timbul akibat merasa direndahkan. Simmel mengungkapkan, konflik bisa menghadirkan batasan-batasan yang membuat suatu kelompok menjadi berbeda dan terpisahkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menjadikan konflik tidak selalu

bersifat negatif, sebab konflik mampu meningkatkan kesadaran internal untuk saling berinteraksi satu sama lain. Bagi Simmel, konflik bukanlah penyebab dari retaknya kebersamaan suatu kelompok, melainkan keengganan dari masing-masing individu untuk saling berinteraksi.

Istilah konflik merujuk pada keinginan hati, kecemburuan, kebencian, dan hawa nafsu. Tak jarang, manusia merekayasa akal sehatnya karena sangat berambisi untuk meraih apa yang mereka inginkan. Akibatnya, banyak hal menjadi tidak rasional karena sisi sentimental sudah berperan dalam perjalanan komunikasi tersebut. Inkonsistensi komunikasi yang terjadi dapat menimbulkan kegaduhan dan ketidakharmonisan yang bisa menyebabkan pertentangan atau pertikaian, mulai dari antarpribadi sampai peperangan antarnegara. Salah satu pertikaian terbesar dalam sejarah, terjadi di kawasan Timur Tengah yaitu perang antara negara Israel dan Palestina. Kedua negara ini berjuang dalam memperebutkan hak kepemilikan atas suatu tanah di wilayah Palestina.

Berdasarkan sejarah, wilayah Timur Tengah telah menjadi titik konflik dunia karena banyaknya persaingan dan perebutan kekuasaan yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Konflik besar yang terjadi adalah runtuhnya peradaban Mesopotamia dan konflik antara 3 agama monoteistik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi (Yunus F. M., 2014). Konflik tersebut memicu terbentuknya aliansi politik dan pasar persenjataan militer yang potensial karena letak kawasan Timur Tengah sangat strategis, sehingga menjadi penting untuk melakukan invasi terhadap poros-poros perlawanan (Cueto, 2024).

Wilayah Palestina sendiri kerap disebut dengan Filistin atau Al-Ard, Al-Muqaddasa yang berarti tanah suci. Secara geografis, letak astronomis Palestina membentang pada garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Palestina adalah hasil dari kesatuan geografis wilayah Timur Tengah yang besar, letaknya di bagian tenggara, belahan timur dunia Arab, yang dikenal dengan sebutan negeri Syam, bersamaan dengan Suriah, Lebanon, dan Yordania (Hermawati, 2005).

Luas wilayah Palestina sendiri mencapai 27.000 km². Pada bagian timur, Palestina berbatasan dengan Sungai Yordan, di bagian barat berbatasan dengan Laut Tengah, di bagian utara berbatasan dengan Lebanon, dan di bagian selatan berbatasan dengan Sinai, Mesir. Meskipun kawasan Palestina tergolong kurang subur karena hasil alamnya tidak begitu melimpah, tetapi kedudukannya sangat strategis karena wilayah Palestina berbatasan langsung dengan 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Negara-negara yang berada di Benua Afrika berhasil terhubung dengan negara-negara Arab di Benua Asia berkat Palestina (Hermawati, 2005). Populasi Palestina sudah multikultural sejak abad ke-19, dengan persentase 86% muslim, 10% nasrani, dan 4% yahudi, mereka hidup berdampingan dengan damai. Namun, ketika memasuki penghujung tahun 1800-an, muncul sebuah kelompok penjajah dari Benua Eropa yang dikenal sebagai zionis. Kelompok ini mewakili minoritas ekstrimis Yahudi yang bertekad menguasai wilayah Palestina karena menganggap tanah tersebut suci atau bahasa lainnya “*The Holy Land*” (Sihbudi, 2007).

Persoalan perebutan wilayah berujung panjang karena koloni agrikultural pertama dari kelompok zionis masuk ke kawasan Palestina pada tahun 1878. Konflik ini disusul dengan migrasi bangsa Yahudi dari Benua Eropa ke tanah Palestina (Pappe, 2009). *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dahulu dikenal sebagai *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mempercayakan Palestina kepada Inggris setelah Perang Dunia I berakhir (1914-1918). Keputusan ini dikenal dengan Mandat Inggris (1920-1948), dimana Inggris diminta untuk menyediakan rumah-rumah nasional bagi orang-orang Yahudi.

Zionis mulai merasa bahwa peluang besar untuk mendirikan negara sendiri di tanah Palestina sudah benar-benar terbuka. Mandat Inggris dilatar belakangi oleh Deklarasi Balfour yang maklumatnya resmi disiarkan pada tanggal 2 November 1917. Surat deklarasi itu ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour. Surat tersebut berisi aspirasi zionis untuk mendirikan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang telah disetujui dan didukung oleh Pemerintahan Inggris. Permintaan tersebut akan

dibantu langsung oleh Inggris karena semuanya sudah jelas dan dianggap tidak akan merugikan hak-hak penduduk terutama orang-orang yang bukan penganut agama Yahudi (Aljaddid & Soekarba, 2014).

Faktor yang mendorong munculnya Deklarasi Balfour adalah balas jasa dari pemerintah Inggris kepada seorang Yahudi Inggris bernama Chaim Weizmann. Saat Perang Dunia I pecah, Weizmann menemukan formula untuk memproduksi aseton yang berguna sebagai bahan peledak. Kemenangan pun berhasil diraih oleh sekutu. Oleh karena itu, Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George, ingin memberikan hadiah sesuai permintaan Weizmann atas jasanya yang besar bagi negara. Weizmann mengatakan bahwa ia menginginkan sebuah “rumah” bagi umat Yahudi. Pada mulanya, George memberikan sebuah wilayah di kawasan Uganda, negara Afrika, untuk menjadi rumah mereka. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Weizmann karena dia ingin wilayahnya berada di kawasan Palestina. Permintaan tersebut akhirnya diterima oleh George berlandaskan *Sykes-Picot Agreement*, dimana setelah kekalahan Turki Utsmani, negara Palestina menjadi milik Inggris sepenuhnya (Cleveland, 2016).

Pada masa Perang Dunia I, wilayah Palestina yang dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari kekhalifahan itu. Tanpa menunda-nunda lagi, Arab segera menghubungi Inggris untuk meminta bantuan karena Arab mengetahui bahwa Inggris merupakan musuh dari Turki sejak zaman Kampanye Gallipoli (Mahfudah et al., 2023). Inggris yang merasa diuntungkan segera membuat kesepakatan dengan Arab agar pihak Arab mau memberikan hadiah berupa pembagian wilayah apabila Inggris berhasil membantu Arab untuk lepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Perjanjian inilah yang dikenal dengan nama *Sykes-Picot* dan disetujui kedua belah pihak pada tahun 1916 dengan ketentuan Perancis menguasai negara Syria bagian barat, Mosul, Damaskus, dan Aleppo. Kemudian Inggris menguasai perbatasan Mesir, wilayah Jaffa, kawasan Iraq, hingga Arab bagian Timur. Sedangkan wilayah Jerusalem diminta agar menjadi milik bersama, tetapi harus berada dalam kendali Inggris, Perancis, dan Russia (Alfiani, 2023).

Keberhasilan Inggris dalam Perang Dunia I, mampu memukul mundur Turki Utsmani dari kepemimpinannya atas negeri Arab. Inilah alasan PBB memberikan mandat kepada Inggris agar mereka bisa mengelola wilayah Palestina dengan baik. Namun, terbitnya Deklarasi Balfour ternyata tidak diketahui oleh Arab, sehingga timbul konflik yang rumit antara penduduk asli Palestina dengan kaum Yahudi yang tiba-tiba datang dari Eropa. Pasalnya, masing-masing dari mereka sudah diberikan janji untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Kedua belah pihak berselisih dan sama-sama merasa memiliki hak atas tanah Palestina. Bentrok pun tidak dapat dihindari lagi, bahkan mereka saling memberikan penyerangan karena tidak ada yang ingin mengalah, masing-masing dari mereka memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya.

Setelah Mandat Inggris atas tanah Palestina berakhir, *United Nations Special Committee On Palestine* (UNSCOP) merekomendasikan PBB untuk memecah wilayah Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 Tahun 1947, dengan persentase 57% untuk negara dan bangsa Israel yang sebagian besar kawasannya memiliki tanah yang gembur dan sangat subur. Sebanyak 43% sisanya dibagi untuk negara dan bangsa Arab-Palestina dengan kawasan yang cukup tandus. Terakhir adalah Jerusalem sebagai zona internasional (Garaudy, 2000). Pada 14 Mei 1948, Negara Israel dengan mayoritas umat Yahudi telah diresmikan secara langsung oleh PBB dan diakui kedaulatannya oleh Amerika Serikat secara *de facto*. Akseptasi ini disusul dengan Uni Soviet yang memberikan pengakuan secara *de jure* (Smith, 2004). Setelah resolusi pembagian wilayah dilaksanakan, Palestina masih belum bisa mewujudkan kemerdekaannya.

Pada tahun 1958, dalam suatu pertemuan yang dilakukan oleh para pemimpin negara Arab, lahir sebuah organisasi yang bernama *Palestine Liberation Organization* (PLO). Pencetusan ini dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser, selaku Presiden Mesir yang menjabat di masa itu. Tidak berhenti sampai disitu, para penguasa Arab terus melakukan pertemuan dan mulai membentuk Liga Arab di Bulan Juli 1964. Konferensi itu membahas nasib rakyat Palestina

dan membuat kesepakatan agar mereka bisa diberikan kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan mengatur wilayahnya sendiri (Saleh, 2001).



Gambar 1.1 *Palestinians Historic Compromise*

Sumber: *Negotiations Affair Department, State of Palestine* (2021)

Permasalahan lain yang melatarbelakangi pecahnya konflik antara negara Israel dengan Palestina adalah perundingan rahasia yang berlangsung pada tanggal 17 September 1978. Perundingan rahasia ini lebih dikenal dengan nama Perjanjian Camp David. Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, Presiden Mesir, Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, membahas tentang pembagian kekuasaan untuk ketiga negara tersebut tanpa melibatkan Palestina di dalamnya. Perjanjian Camp David bahkan berhasil menyatukan negara Mesir dan Israel pada Maret 1979 setelah Perang Enam Hari. Israel sepakat untuk mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir dengan menandatangani pakta perdamaian (Iqbal, 2010).

Kemerdekaan Palestina masih belum menemukan titik terang. Palsnya, pembahasan mengenai pemerintahan otonomi di Jalur Gaza dan Tepi Barat wilayah Palestina telah diatur dalam pakta perdamaian. Akan tetapi, Palestina sama sekali tidak menerima proposal tersebut, seperti yang diajukan oleh Israel. Pihak Israel juga enggan melakukan perembukan dengan PLO. Padahal, eksistensi

PLO sudah diakui oleh PBB sebagai organisasi yang mewakili rakyat Palestina. Tidak tinggal diam, Palestina melancarkan aksi protes pada tahun 1987 yang menimbulkan kekerasan hingga pecahlah apa yang disebut dengan Intifada. Intifada sendiri merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap perbuatan Israel di Jalur Gaza dan disinilah Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) terbentuk (Ningsih, 2023).

Konflik antara Israel dan Palestina semakin memanas setelah memasuki babak baru dengan ketegangan politik dan peningkatan kekerasan yang sangat masif. Jumlah korban terus bertambah setelah meletusnya perang pada 7 Oktober 2023 kemarin, ketika Hamas menyerang Israel. Serangan udara kemudian diluncurkan sebagai bentuk respons Israel terhadap Hamas. Terdapat lebih dari 22.000 warga Palestina, termasuk di dalamnya warga Israel, dan beberapa individu asing kehilangan nyawanya (Hassona, 2024). Terhitung hingga Januari 2024 jumlah korban tewas mencapai 24.620 orang dan 61.830 orang mengalami luka-luka akibat eskalasi serangan yang terjadi (Harb & Osgood, 2024). Konflik antara kedua negara ini merupakan konflik yang paling signifikan dalam 50 tahun terakhir, terutama di sekitar Jalur Gaza. Sementara itu, peningkatan jumlah korban menandakan bahwa krisis kemanusiaan semakin buruk.

Kini, masyarakat internasional dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk meninjau dampak krisis kemanusiaan untuk berpartisipasi dalam usaha penyelesaian yang berkelanjutan. Dukungan global menjadi katalisator penting dalam mendorong upaya menuju perdamaian dunia (Khoiruman & Wariati, 2023). Salah satu bentuk dukungan global yang dapat diberikan kepada masyarakat Palestina untuk menyuarakan perlawanan terhadap zionis Israel adalah mengkampanyekan gerakan boikot kepada produk-produk yang terafiliasi oleh Israel. Aksi ini digaungkan pada tahun 2005 dengan terciptanya sebuah gerakan sosial yang bernama *BDS Movement*.

Boycott, Divestment, Sanction atau BDS dicetuskan oleh masyarakat sipil Palestina untuk mendorong berbagai negara, lembaga, dan masyarakat dunia agar melakukan boikot, menarik investasi, dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel

(Kurniawan, 2023). Bisnis usaha yang dianggap mendukung Israel terhadap serangan Gaza adalah Starbucks dan McDonald's. Pemboikotan bermula ketika McDonald's memberikan ribuan makanan secara gratis untuk tentara Israel dan warga sipilnya (Cahyani, 2023). *Brand* lain yang mendukung Israel secara terang-terangan adalah Starbucks. Pihak Starbucks mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung Israel dari sisi finansial (Nugroho & Firdaus, 2023). Aksi solidaritas masyarakat internasional semakin menguat dan menyebabkan terjadinya penurunan laba penjualan dari kedua *franchise* tersebut. Negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas muslim juga turut memberikan dukungannya kepada Palestina (Wardany et al., 2024).

Kompleksitas geopolitik yang terjadi di wilayah Timur Tengah memberikan perhatian serius, Majelis Umum PBB menegaskan resolusi untuk menghentikan permusuhan dan penyeruan untuk mengakhiri gencatan senjata di Gaza. Setelah diadopsi, terdapat 120 negara yang setuju dengan resolusi ini (Ayudiana & Ahdiat, 2023). Presiden ke-7 Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras penyerangan Israel kepada masyarakat sipil di Gaza (BPMI Setpres, 2023).

Voting Ended		10/27/2023		3:49:01 PM	
Item 5 - A/ES-10/L.25					
Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations					
<input checked="" type="checkbox"/> AFGHANISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> CAMEROON	<input checked="" type="checkbox"/> FINLAND	<input checked="" type="checkbox"/> KUWAIT	<input checked="" type="checkbox"/> NEPAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAUDI ARABIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBANIA	<input checked="" type="checkbox"/> CANADA	<input checked="" type="checkbox"/> FRANCE	<input checked="" type="checkbox"/> KYRGYZSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> NETHERLAN...	<input checked="" type="checkbox"/> SENEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> ALGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> CENTRAL AF...	<input checked="" type="checkbox"/> GABON	<input checked="" type="checkbox"/> LAO PDR	<input checked="" type="checkbox"/> NEW ZEALAND	<input checked="" type="checkbox"/> SERBIA
<input checked="" type="checkbox"/> ANDORRA	<input checked="" type="checkbox"/> CHAD	<input checked="" type="checkbox"/> GAMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> LATVIA	<input checked="" type="checkbox"/> NICARAGUA	<input checked="" type="checkbox"/> SEYCHELLES
<input checked="" type="checkbox"/> ANGOLA	<input checked="" type="checkbox"/> CHILE	<input checked="" type="checkbox"/> GEORGIA	<input checked="" type="checkbox"/> LEBANON	<input checked="" type="checkbox"/> NIGER	<input checked="" type="checkbox"/> SIERRA LEONE
<input checked="" type="checkbox"/> ANTIGUA-BA...	<input checked="" type="checkbox"/> CHINA	<input checked="" type="checkbox"/> GERMANY	<input checked="" type="checkbox"/> LESOTHO	<input checked="" type="checkbox"/> NIGERIA	<input checked="" type="checkbox"/> SINGAPORE
<input checked="" type="checkbox"/> ARGENTINA	<input checked="" type="checkbox"/> COLOMBIA	<input checked="" type="checkbox"/> GHANA	<input checked="" type="checkbox"/> LIBERIA	<input checked="" type="checkbox"/> NORTH MAC...	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVAKIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARMENIA	<input checked="" type="checkbox"/> COMOROS	<input checked="" type="checkbox"/> GREECE	<input checked="" type="checkbox"/> LIBYA	<input checked="" type="checkbox"/> NORWAY	<input checked="" type="checkbox"/> SLOVENIA
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRALIA	<input checked="" type="checkbox"/> CONGO	<input checked="" type="checkbox"/> GRENADA	<input checked="" type="checkbox"/> LIECHTENSTEIN	<input checked="" type="checkbox"/> OMAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOLOMON IS...
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTRIA	<input checked="" type="checkbox"/> COSTA RICA	<input checked="" type="checkbox"/> GUATEMALA	<input checked="" type="checkbox"/> LITHUANIA	<input checked="" type="checkbox"/> PAKISTAN	<input checked="" type="checkbox"/> SOMALIA
<input checked="" type="checkbox"/> AZERBAIJAN	<input checked="" type="checkbox"/> COTE D'IVOIRE	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA	<input checked="" type="checkbox"/> LUXEMBOURG	<input checked="" type="checkbox"/> PALAU	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH AFRICA
<input checked="" type="checkbox"/> BAHAMAS	<input checked="" type="checkbox"/> CROATIA	<input checked="" type="checkbox"/> GUINEA-BISS...	<input checked="" type="checkbox"/> MADAGASCAR	<input checked="" type="checkbox"/> PANAMA	<input checked="" type="checkbox"/> SOUTH SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BAHRAIN	<input checked="" type="checkbox"/> CUBA	<input checked="" type="checkbox"/> GUYANA	<input checked="" type="checkbox"/> MALAWI	<input checked="" type="checkbox"/> PAPUA NEW ...	<input checked="" type="checkbox"/> SPAIN
<input checked="" type="checkbox"/> BANGLADESH	<input checked="" type="checkbox"/> CYPRUS	<input checked="" type="checkbox"/> HAITI	<input checked="" type="checkbox"/> MALAYSIA	<input checked="" type="checkbox"/> PARAGUAY	<input checked="" type="checkbox"/> SRI LANKA
<input checked="" type="checkbox"/> BARBADOS	<input checked="" type="checkbox"/> CZECHIA	<input checked="" type="checkbox"/> HONDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> MALDIVES	<input checked="" type="checkbox"/> PERU	<input checked="" type="checkbox"/> SUDAN
<input checked="" type="checkbox"/> BELARUS	<input checked="" type="checkbox"/> DEM PR OF K...	<input checked="" type="checkbox"/> HUNGARY	<input checked="" type="checkbox"/> MALI	<input checked="" type="checkbox"/> PHILIPPINES	<input checked="" type="checkbox"/> SURINAME
<input checked="" type="checkbox"/> BELGIUM	<input checked="" type="checkbox"/> DEM REP OF ...	<input checked="" type="checkbox"/> ICELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MALTA	<input checked="" type="checkbox"/> POLAND	<input checked="" type="checkbox"/> SWEDEN
<input checked="" type="checkbox"/> BELIZE	<input checked="" type="checkbox"/> DENMARK	<input checked="" type="checkbox"/> INDIA	<input checked="" type="checkbox"/> MARSHALL IS...	<input checked="" type="checkbox"/> PORTUGAL	<input checked="" type="checkbox"/> SWITZERLAND
<input checked="" type="checkbox"/> BENIN	<input checked="" type="checkbox"/> DJIBOUTI	<input checked="" type="checkbox"/> INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITANIA	<input checked="" type="checkbox"/> QATAR	<input checked="" type="checkbox"/> SYRIAN ARA...
<input checked="" type="checkbox"/> BHUTAN	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICA	<input checked="" type="checkbox"/> IRAN (ISLAMI...	<input checked="" type="checkbox"/> MAURITIUS	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF KOREA	<input checked="" type="checkbox"/> TAJIKISTAN
<input checked="" type="checkbox"/> BOLIVIA	<input checked="" type="checkbox"/> DOMINICAN ...	<input checked="" type="checkbox"/> IRAQ	<input checked="" type="checkbox"/> MEXICO	<input checked="" type="checkbox"/> REP OF MOL...	<input checked="" type="checkbox"/> THAILAND
<input checked="" type="checkbox"/> BOSNIA-HER...	<input checked="" type="checkbox"/> ECUADOR	<input checked="" type="checkbox"/> IRELAND	<input checked="" type="checkbox"/> MICRONESIA...	<input checked="" type="checkbox"/> ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/> TIMOR-LESTE
<input checked="" type="checkbox"/> BOTSWANA	<input checked="" type="checkbox"/> EGYPT	<input checked="" type="checkbox"/> ISRAEL	<input checked="" type="checkbox"/> MONACO	<input checked="" type="checkbox"/> RUSSIAN FED...	<input checked="" type="checkbox"/> TOGO
<input checked="" type="checkbox"/> BRAZIL	<input checked="" type="checkbox"/> EL SALVADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ITALY	<input checked="" type="checkbox"/> MONGOLIA	<input checked="" type="checkbox"/> RWANDA	<input checked="" type="checkbox"/> TONGA
<input checked="" type="checkbox"/> BRUNEI DAR...	<input checked="" type="checkbox"/> EQUATORIAL...	<input checked="" type="checkbox"/> JAMAICA	<input checked="" type="checkbox"/> MONTENEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT KITTS-...	<input checked="" type="checkbox"/> TRINIDAD-TO...
<input checked="" type="checkbox"/> BULGARIA	<input checked="" type="checkbox"/> ERITREA	<input checked="" type="checkbox"/> JAPAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOROCCO	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT LUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TUNISIA
<input checked="" type="checkbox"/> BURKINA FASO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTONIA	<input checked="" type="checkbox"/> JORDAN	<input checked="" type="checkbox"/> MOZAMBIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> SAINT VINCE...	<input checked="" type="checkbox"/> TURKMENIST...
<input checked="" type="checkbox"/> BURUNDI	<input checked="" type="checkbox"/> ESWATINI	<input checked="" type="checkbox"/> KAZAKHSTAN	<input checked="" type="checkbox"/> MYANMAR	<input checked="" type="checkbox"/> SAMOA	<input checked="" type="checkbox"/> TUVALU
<input checked="" type="checkbox"/> CABO VERDE	<input checked="" type="checkbox"/> ETHIOPIA	<input checked="" type="checkbox"/> KENYA	<input checked="" type="checkbox"/> NAMIBIA	<input checked="" type="checkbox"/> SAN MARINO	<input checked="" type="checkbox"/> TÜRKIYE
<input checked="" type="checkbox"/> CAMBODIA	<input checked="" type="checkbox"/> FIJI	<input checked="" type="checkbox"/> KIRIBATI	<input checked="" type="checkbox"/> NAURU	<input checked="" type="checkbox"/> SAO TOME-P...	<input checked="" type="checkbox"/> UGANDA
<input checked="" type="checkbox"/> IN FAVOUR: 120	<input checked="" type="checkbox"/> AGAINST: 14	<input checked="" type="checkbox"/> ABSTENTION: 45			

Gambar 1.2 Hasil Voting Resolusi Kemanusiaan dan Seruan Perdamaian

Sumber: *International Networking for Humanitarian* (2023)

Setelah voting dilaksanakan, Israel masih tidak menggubris dan mengatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan operasi penyerangan di Gaza (Raharjo, 2023). Seruan itu viral di media sosial hingga menuai berbagai kritik dari masyarakat global. Keprihatinan yang muncul terhadap Palestina berkembang menjadi gerakan sosial di ruang digital untuk menunjukkan solidaritas kuat netizen di seluruh dunia. Dukungan internasional yang digalangan untuk menyebarkan informasi terkait kampanye BDS, membuat tagar seperti #BoycottIsrael dan #FreePalestine menjadi *trending topic* di jagat maya. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan advokasi pada perubahan sosial yang cukup besar.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Kaplan dan Haenlin (2010), media sosial memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi mengenai gerakan boikot karena media sosial bisa menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Gelombang dukungan global terhadap gerakan boikot bermunculan di *platform* media sosial maupun media massa. Fenomena sosial ini membutuhkan peranan media dalam menyebarkan informasi yang mampu menggiring opini publik untuk menyukseskan aksi boikot secara lebih meluas (Muslimah et al., 2024).

Sebenarnya, seruan boikot sudah digaungkan sejak tahun 1920-an, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa aksi boikot baru dimulai setelah anggota Liga Arab berkumpul di Damaskus pada tahun 1950-an. Arab ingin menyusun strategi untuk menjalankan aktivitas boikot dengan mendirikan *Central Boycott Office* (CBO) pada Mei 1951 untuk mengkoordinasikan mekanisme pemboikotan. Penghambatan penjualan tanah di Palestina dan memboikot barang serta jasa yang dijual Israel merupakan cara yang dilakukan untuk mencegah kedatangan imigran Yahudi masuk ke wilayah Palestina (Yunus et al., 2018).

Dari banyaknya produk yang harus diboikot, tentu akan sulit jika orang harus melakukan list satu per satu. Selain rumit, hal tersebut bisa memakan waktu yang cukup panjang. Gerakan sosial *BDS Movement* kemudian mengeluarkan daftar resmi dari produk-produk yang terafiliasi oleh Israel. Seorang aktivis

Palestina bernama Ahmed Bashbash yang kehilangan saudaranya saat pertempuran Hamas dan Israel kemarin, berinisiatif mengumpulkan seluruh daftar produk tersebut dan membuat sebuah aplikasi untuk memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah mengidentifikasi perusahaan dan produk-produk apa saja yang termasuk dalam daftar (Wesolowski, 2023).

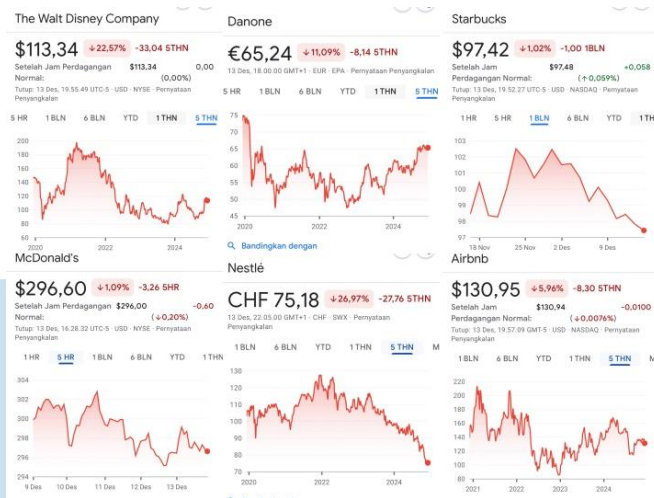
Aplikasi tersebut bernama No Thanks dan cara kerjanya cukup mudah. Pengguna hanya perlu memindai kode batang pada produk yang ingin dicek. Jika muncul keterangan “no thanks” dengan latar berwarna merah, artinya produk ada dalam daftar boikot. Sedangkan jika kalimat yang ditampilkan adalah “this product is good for now”, dengan latar berwarna hijau, artinya perusahaan atau produk tersebut bukan merupakan perusahaan yang terafiliasi Israel. Apabila terdapat kekeliruan, pengguna dapat mengajukan *suggestion* dari aplikasinya.



Gambar 1.3 Daftar Produk Yang Terafiliasi Israel

Sumber: *bdsmovement.net* (2023)

Gerakan boikot ini memberikan dampak yang cukup signifikan pada penurunan penjualan beberapa produk. Dalam bidang perekonomian, Indonesia juga ikut memberikan tekanan kepada Israel agar tunduk kepada hukum internasional. Perlawanan Indonesia melalui kegiatan boikot ditujukan agar Israel mau menarik diri dari Gaza dan dapat segera memberhentikan agresi penyerangan kepada rakyat Palestina (El-Saha, 2023)



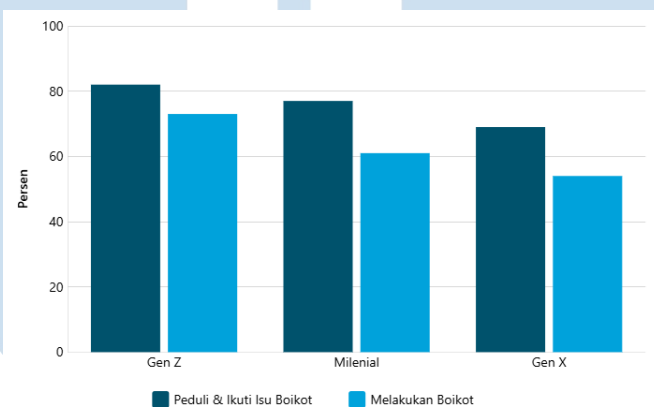
Gambar 1.4 Penurunan Penjualan Produk yang Terafiliasi Israel

Sumber: NASDAQ Stock Market (2024)

Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga memperkuat solidaritas mereka dengan mengkampanyekan gerakan ini di media sosial dan menggunakan tagar #BDSIndonesia atau #SavePalestine agar pengguna lain tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan BDS. Pendukung kampanye pemboikotan paling besar di Indonesia berasal dari Generasi *Zoomers* atau lebih akrab disapa dengan sebutan Gen Z. Kepedulian Gen Z jika dibandingkan dengan generasi lainnya dapat dibuktikan melalui *survey* yang dilakukan oleh Jakpat pada tanggal 19-20 Februari 2024 dengan *margin of error* atau tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%. Jakpat atau Jajak Pendapat merupakan aplikasi *online survey* di Indonesia yang memiliki tujuan untuk menghubungkan antara responden dengan para pelaku *survey*, seperti akademisi atau para pelaku bisnis ketika ingin melakukan riset terhadap produk atau pangsa pasar tertentu (Jakpat, 2018).

Sebanyak 1.153 responden nasional yang terdiri dari 53% laki-laki dan 47% perempuan mengikuti survei yang membahas kepedulian mereka terkait konflik Israel dan Palestina serta keterlibatan mereka dalam aksi pemboikotan. Dari total keseluruhan responden, 35% di antaranya adalah Gen Z, 46% Generasi Y atau Milenial, dan 19% sisanya adalah Gen X. Sebesar 82% responden dari kelompok Gen Z menyatakan kepeduliannya terhadap konflik yang dialami antara Israel dengan Palestina. Berdasarkan hasil survei juga, kelompok Gen Z

merupakan generasi yang paling banyak melakukan aksi pemboikotan dengan total 73% dibandingkan 2 generasi lainnya. Dari total 46% Generasi Y atau Milenial, 77% di antaranya menyatakan kepedulian mereka terhadap konflik Israel dan Palestina, tetapi hanya 61% dari kelompok ini yang melakukan aksi pemboikotan. Sedangkan kelompok Gen X merupakan kelompok generasi yang paling sedikit mendukung aksi pemboikotan dibandingkan 2 generasi lainnya (Annur, 2024).



Gambar 1.5 Data Tingkat Kepedulian Responden Dalam Aksi Pemboikotan

Sumber: databoks.katadata.co.id (2024)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Kopperschmidt (2000), generasi adalah sekelompok individu yang memiliki kesamaan dari tahun lahir, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam fase pertumbuhan individu tersebut yang berpengaruh signifikan pada kehidupan mereka. Generasi X merupakan generasi yang lahir antara tahun 1960-1980. Gen X dikenal sebagai generasi yang tangguh, mandiri dan loyal terhadap pekerjaan mereka. Hal ini membuat Gen X jauh lebih mengutamakan citra, ketenaran, dan uang karena mereka merasa bahwa kerja keras yang dilakukan, harus sepadan dengan hasil yang didapatkan. Karakteristik tersebut memicu pertumbuhan sifat yang individualis. Perkembangan teknologi yang belum begitu pesat juga mempengaruhi sifat tersebut, sehingga mereka menjadi individu tertutup yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Pemberitaan yang mereka terima dari media terkait lingkungan atau fenomena sosial masih bersifat satu arah. Gen X tidak bisa memberikan umpan balik berupa

respon penerimaan atau penolakan terhadap pemberitaan tersebut, seperti yang bisa dilakukan dengan mudah pada zaman ini (Jurkiewicz, 2012).

Generasi Y atau yang lebih dikenal dengan sebutan Milenial, merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980-1995. Gen Y tumbuh dan berkembang ketika internet sudah ada. Sebagai generasi yang hidup dalam era *internet booming*, Gen Y memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini bergantung pada strata ekonomi dan status sosial di mana mereka dibesarkan. Pola komunikasi mereka juga lebih terbuka dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena mereka sudah bisa untuk berekspresi di sosial media. Akan tetapi, kebebasan berekspresi tersebut masih dibatasi oleh pengaruh politik di masing-masing negara (Lyons, 2004).

Terakhir adalah Generasi Z, generasi paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Gen Z lahir antara tahun 1995-2010. Beberapa sebutan lain untuk menyapa generasi ini adalah *iGeneration*, *Gen Wii*, *Gen Tech*, *Net Gen*, *Homeland Generation*, dan *Digital Natives*. Sebutan ini disematkan pada Gen Z karena sedari mereka kecil mereka sudah bersanding dengan teknologi digital, sebab akses terhadap internet sudah menjadi budaya global (Putra, 2016). Pada tahun 2015, *Forbes Magazine* membuat sebuah survei di Amerika Utara dan Selatan, Timur Tengah, dan Afrika terkait pandangan masyarakat kepada Gen Z (Dill, 2015). Hasil temuan dari survei yang diikuti oleh 49.000 responden itu menyatakan bahwa Gen Z merupakan generasi global pertama yang tumbuh di lingkungan yang serba kompleks. Paparan informasi yang mereka terima dari berbagai sumber dan bagaimana mereka menjadi sumber itu sendiri, membuat konstruksi pemikiran mereka jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Herani & Angela (2024) juga menyatakan bahwa 65% Gen Z mendukung aksi pemboikotan. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini membatasi perhatian pada keterlibatan Gen Z karena mereka adalah generasi yang paling terdepan dalam melakukan dan menyuarkan aksi pemboikotan.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik antara Israel dengan Palestina menuai berbagai respon dari masyarakat Indonesia, mulai dari kritikan terhadap lemahnya peran PBB, hingga dukungan kepada masyarakat Palestina dengan cara melakukan pemboikotan. Beragam konstruksi sosial mulai bermunculan, salah satunya adalah pemaknaan mereka terkait aksi pemboikotan. Mayoritas masyarakat yang beragama muslim menerima, bahkan melakukan aksi pemboikotan. Namun, tidak semua muslim menerima dan melaksanakan aksi pemboikotan. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristiani, cenderung lebih mendukung Israel jika mereka melihat dari perspektif agama. Akan tetapi, terdapat juga individu beragama Kristiani yang menerima dan melaksanakan aksi pemboikotan. Lantas akan menjadi menarik apabila penelitian ini mengkaji tentang proses konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat mengenai realitas pemboikotan tersebut. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara pandang individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam keputusannya untuk menerima atau menolak realitas pemboikotan tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana proses konstruksi sosial di masyarakat mengenai realitas pemboikotan yang terjadi kepada produk-produk yang terafiliasi Israel?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses konstruksi sosial di masyarakat mengenai realitas pemboikotan yang terjadi kepada produk-produk yang terafiliasi Israel.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan bagi penelitian selanjutnya dengan menghadirkan solusi dalam bentuk studi kasus komparatif atas keterbatasan informasi yang dihadapi mengenai topik pemboikotan produk. Dengan demikian, penelitian ini bisa memberikan kontribusi di bidang akademis

dalam hal wawasan sejarah serta bahan rujukan untuk mengaplikasikan *Social Construction Theory* ketika membahas pemaknaan individu terkait suatu realitas sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi orang-orang yang menyatakan diri sebagai pendukung Palestina, tumpukan informasi terkait produk yang harus di boikot menimbulkan keresahan, sehingga mereka tidak mampu melakukan aplikasi boikot secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahannya terkait isu tersebut. Selain itu, pihak-pihak terkait juga bisa memperoleh manfaat berupa bahan bacaan untuk berdiskusi dan membuka sudut pandang baru yang belum diketahui oleh pihak oposisi atau pihak netral terkait isu pemboikotan ini.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat, bahwa konflik antara Israel dengan Palestina bukan merupakan konflik agama, melainkan perebutan wilayah antara kedua negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang memiliki usaha, agar bisa memanfaatkan momentum untuk memasarkan produk-produknya.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya mendalami konstruksi sosial terkait pemboikotan produk terafiliasi Israel pada konsumen generasi Z yang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dengan karakteristik agama dan status sosial ekonomi informan yang berbeda.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A